



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat. Dalam prakteknya banyak daerah yang menghadapi keterbatasan kemampuan memperoleh pendapatan, sementara itu kebutuhan anggaran belanja dan pembiayaan sangat besar sehingga diperlukan adanya arah kebijakan umum anggaran yang mengupayakan keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan untuk menekan terjadinya defisit anggaran yang berlebihan sehingga mengancam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan.

Kebijakan Umum APBD merupakan arah pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran yang disepakati dan dijadikan pedoman penyusunan prioritas dan plafon Anggaran sementara serta rancangan APBD. Dokumen ini memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017. Kebijakan umum APBD Tahun 2017 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*topdown/ bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan. Dengan demikian diharapkan terdapat keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan penganggaran.



Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan visi, misi dan target pemerintah daerah melalui kebijakan penganggaran yang berkesinambungan dan terintegrasi antar semua sektor serta tingkat pemerintahan dengan selalu memperhatikan dinamika politik, sosial dan ekonomi yang berkembang secara nasional maupun lokal.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2017 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2017 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan sumber-sumber pendapatan, belanja daerah baik yang dialokasikan untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah maupun pemenuhan pelayanan publik serta pembiayaan daerah baik dalam rangka menjaga defisit pada batas yang wajar maupun penggunaan surplus.
- b. Melakukan analisa dan proyeksi kondisi ekonomi daerah dan berbagai asumsi dasar dalam rangka penyusunan RAPBD 2017.
- c. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan dibidang pendapatan serta upaya dalam rangka memenuhi target tersebut.
- d. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan belanja pembangunan daerah berdasarkan jenis belanja, urusan pemerintahan dan SKPD.
- e. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



1.3. Dasar Penyusunan KUA

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2016;
16. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017;



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Berdasarkan publikasi hasil analisis pembangunan wilayah Provinsi Maluku Utara oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2015 menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2008 s/d 2013 berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Penghitungan PDRB Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2011 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 2,096,226.4 sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 1,604,215.1. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan dibanding tahun 2014, dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 1,867,244.8 sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 1,510,607.7.

Dari data yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel II.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	355,111.4	400,605.6	451,225.6	502,169.1	541,141.7
B	Pertambangan dan Penggalian	773.5	891.5	952.4	1,063.2	1,182.4
C	Industri Pengolahan	59,364.1	63,674.1	68,356.5	74,199.5	79,942.8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	996.2	1,141.1	978.5	1,598.4	2,587.1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,844.4	1,995.9	2,213.4	2,481.9	2,717.1
F	Konstruksi	85,113.1	98,270.8	104,810.5	117,252.3	135,227.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	126,098.7	140,754.0	156,751.5	180,835.8	210,164.1
H	Transportasi dan Pergudangan	43,528.6	48,164.8	56,134.1	67,154.7	78,821.2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,183.1	2,487.2	2,771.6	3,210.6	3,563.3
J	Informasi dan Komunikasi	45,052.9	48,081.0	52,632.5	59,357.1	66,665.3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28,173.0	33,988.5	38,648.8	41,765.1	45,316.1
L	Real Estate	1,164.3	1,231.7	1,363.0	1,511.5	1,721.4
M,N	Jasa Perusahaan	5,508.6	5,945.6	6,417.4	7,174.3	7,926.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	477,806.6	540,175.8	598,136.5	690,169.2	786,102.3
P	Jasa Pendidikan	56,154.6	59,302.9	63,675.3	71,109.8	79,974.4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25,592.8	27,617.6	31,128.0	36,588.2	42,261.4
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,623.6	8,231.8	8,624.7	9,603.9	10,911.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1,322,089.4	1,482,559.9	1,644,820.1	1,867,244.8	2,096,226.4

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan

*angka sementara

**angka sangat sementara

Aktifitas pemerintah provinsi di Sofifi masih merupakan faktor utama yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi Kota Tidore Kepulauan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perlu ada kebijakan yang konsisten dan terarah untuk memanfaatkan aktifitas pemerintahan provinsi di wilayah Kota Tidore Kepulauan agar mampu mendorong berkembangnya sektor-sektor jasa lainnya. Selain itu juga pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam kerangka kebijakan Sigitiga Emas (Tidore-Ternate-Jailolo) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



2.1.2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak serta kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang segalanya dinilai dengan uang. Keuangan daerah digunakan sebagai sumber dana dalam rangka penganggaran pelaksanaan urusan wajib maupun urusan pilihan.

Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2015 sebesar Rp. 713,691,092,887,- dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 820,545,791,325,-. Sedangkan target penerimaan tahun 2017 Rp. 751,236,284,310.

2.1.3. Perbankan

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Pada dunia ekonomi moderen saat ini, masyarakat sangat bank minded. Ini dapat dilihat dari makin maraknya masyarakat untuk menyimpan, berbisnis bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan. Hal ini menyebabkan semakin maraknya dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan.

Sampai dengan tahun 2016 di Kota Tidore Kepulauan terdapat 4 (empat) Bank Umum Pemerintah yaitu Bank Rakyat Indoensia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Maluku dan Bank Muamalat. Penghimpunan dana dari Bank diatas dapat diikuti melalui tabel berikut ini:

a. Bank BNI KLN Soasio

Tabel II.2 Data Dana Pihak ke-3 Bank BNI KLN Soasio
Tahun 2013-2015 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Tabungan	Deposito	Giro	Kredit	Jumlah
1	2013	56.145	19.129	78.172	17.931	171.378
2	2014	50.464	40.895	107.769	23.763	222.891
3	2015	67.322	35.499	53.515	24.120	180.456



b. Bank Maluku Cab. Soasio

Tabel II.3 Data Dana PT. Bank Maluku Cab. Soasio
Tahun 2013 – 2015

No	Tahun	Tabungan	Deposito	Giro	Kredit	Jumlah
1	2013	217.491.745.230,-	29.503.100.000	1.217.938.998.371	108.154.796.663	1.573.088.640.264
2	2014	244.659.163.362,86,-	44.632.700.000	799.279.352.550,67	117.283.892.206.94	1.205.855.108.120.47
3	2015	24.977.934.702,48	3.059.600.000,00	25.193.478.478,45	122.782.415.798,74	176.013.428.979,67

c. Bank BRI Unit cab. Soasio

Tabel II.4 Data Dana Bank BRI Unit cab. Soasio
Tahun 2013 – 2015

No	Tahun	Tabungan	Deposito	Giro	Kredit	Jumlah
1	2013	6.237.141.652,-	19.741.382.338,-	8.539.417.345,-	235.608.578.126,-	270.126.519.461
2	2014	16.960.357.731,-	53.772.782.339,-	98.071.876.173,-	-	168.805.016.243
3	2015	,-	,-	,-	,-	,-

d. Bank Muamalat

Tabel II.5 Data Dana Bank Muamalat
Tahun 2014-2015

No	Tahun	Tabungan	Deposito	Giro	Kredit	Jumlah
1	2014	14.455.605.546,-	4.293.936.073,-	1.001.813.314,-	3.887.667.338,-	23.639.022.271,-
2	2015	16.585.266.308,-	5.801.833.365,-	622.604.935,-	2.799.563.682,-	25,809,268,290,-

2.1.4. Produksi

Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendukung perekonomian dan secara riil masih merupakan mata pencaharian terbesar masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan salah satu *leading sektor* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini terbagi menjadi tujuh sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, perkebunan tahunan, peternakan dan sub sektor jasa pertanian dan perburuan.

Tahun 2011-2015 pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan. Pada tahun 2011 tumbuh sebesar 26,86%, namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan hingga menjadi 25,82% di



tahun 2015. Jika melihat peran sub sektor, penyumbang terbesar adalah sub sektor perkebunan tahunan, diikuti oleh sub sektor tanaman pangan. Sektor pertanian dan perikanan perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan kontribusinya bagi PDRB Kota Tidore Kepulauan karena menjadi salah satu sektor unggulan.

Tabel. II.6 Distribusi Presentase Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26.86	27.02	27.43	26.89	25.82
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	17.81	18.41	19.12	18.86	18.08
	a. Tanaman Pangan	2.06	2.12	2.23	2.08	1.97
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.29	0.29	0.28	0.25	0.24
	c. Perkebunan Semusim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.02	1.03	1.09	1.07	1.01
	e. Perkebunan Tahunan	13.06	13.61	14.14	14.13	13.55
	f. Peternakan	1.14	1.12	1.14	1.10	1.08
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.24	0.23	0.24	0.23	0.22
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.17	1.09	0.99	0.98	0.93
3	Perikanan	7.88	7.52	7.32	7.05	6.80

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan

2.1.5. Industri

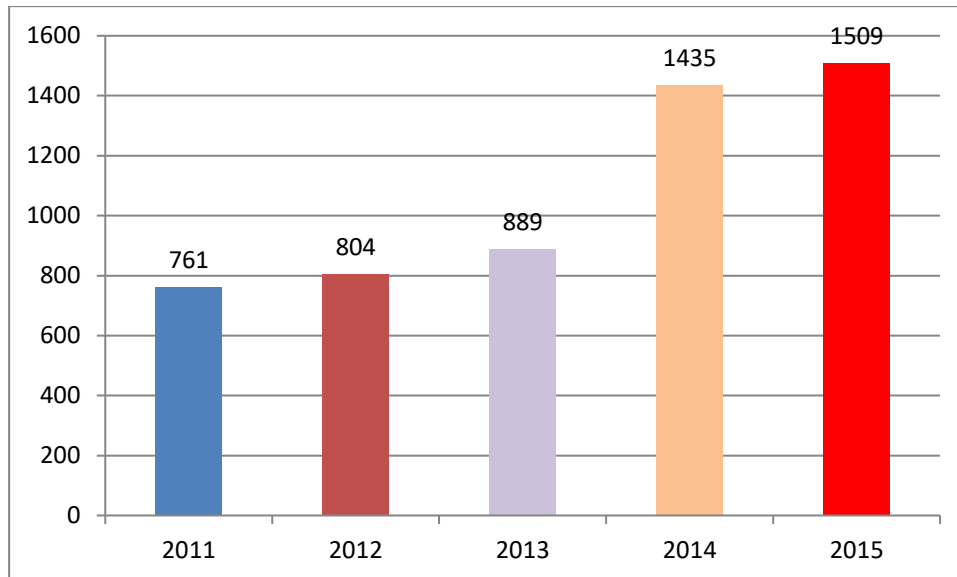
Industri kecil dan menengah atau IKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Selain itu IKM terbukti mampu bertahan dan terus berkembang ditengah krisis, karena pada umumnya sektor ini masih memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu Sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, artinya sebagian besar kebutuhan IKM tidak mengandalkan barang impor.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sejumlah 1509 unit jika dibandingkan dengan



tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik perkembangan IKM dari tahun 2011-2015 :

Gambar II.3 Perkembangan IKM Kota Tidore Kepulauan (Unit)
Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM

Berikut ini sub sektor industri tahun 2011-2015 :

Tahun	Industri Pangan	Industri Logam & Kerajinan	Industri Aneka	Jumlah
2011	461	85	215	761
2012	504	97	203	804
2013	550	115	224	889
2014	958	157	320	1435
2015	814	67	628	1509

Selain Industri Kecil dan Menengah, pemerintah daerah perlu berkerjasama dengan investor untuk pengembangan industri berskala besar dalam rangka menyerap tenaga kerja yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2.1.6. Pengangguran

Dalam penyusunan APBD, pemerintah telah mengalokasikan anggaran secara proposional untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi



pengangguran. Namun kondisi ekonomi secara nasional mengalami perlambatan dan kebijakan moratorium penerimaan CPNS telah berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah pengangguran di Kota Tidore Kepulauan mengalami kenaikan dari 1621 jiwa pada tahun 2014 menjadi 2.027 jiwa pada tahun 2015. Jika dirinci menurut jenis kelamin, pengangguran laki-laki berjumlah 609 jiwa (30,04 %) sementara pengangguran perempuan berjumlah 1418 jiwa (69,95 %).

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas dan juga mengacu pada RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021, maka perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperlihatkan dengan berbagai asumsi sebagai berikut :

- a). Kondisi ekonomi global yang diprediksi akan membaik namun masih rentan terhadap krisis dan penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017, serta penurunan pendapatan daerah akibat berkurangnya DAK dan dana perimbangan akan berdampak pada kondisi ekonomi daerah. Untuk itu pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2017 diprediksi lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- b). Dari sisi investasi sektor swasta belum menunjukkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Data pada tahun 2011 sampai 2016 tidak mengindikasikan adanya peran yang signifikan. Artinya pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah.
- c). Inisiatif pemerintah daerah dalam membangun kerjasama antar daerah (Tidore-Ternate-Jailolo) yang disebut dengan segitiga emas pada tahun 2017 dapat memberikan peluang bagi pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata serta sektor-sektor lainnya. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan



masyarakat dan memberikan kontribusi bagi peningkatan PDRB Kota Tidore Kepulauan.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (R A P B D)

3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBN

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2017 di kisaran 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan ini mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Perekonomian global yang diperkirakan membaik di tahun 2017 diharapkan mampu mendukung kinerja perekonomian nasional. Meskipun demikian, perbaikan tersebut menghadapi sejumlah risiko seperti perkiraan penurunan kinerja ekonomi Tiongkok, adanya ketidakpastian ekonomi Eropa yang sedang melakukan penyesuaian terhadap Brexit, dan risiko stabilitas akibat perubahan arah kebijakan ekonomi AS setelah pemilihan umum Presiden.

Dari sisi domestik, perkiraan perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2017 didukung oleh membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang relatif stabil terutama harga barang kebutuhan pokok. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diperkirakan tetap memiliki kinerja cukup baik yang didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Selain itu, kebijakan amnesti pajak diharapkan juga mampu mendorong investasi di sektor riil melalui penguatan likuiditas dari hasil repatriasi dana yang ada di luar negeri. Seiring membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan. Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian juga diperkirakan menunjukkan penguatan yang salah satunya dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan arah kebijakan ekspor terhadap produk bernilai tambah tinggi.



Terdapat tiga faktor penting yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 yaitu, ekspor non migas, investasi dan peningkatan kapasitas fiskal. Hal ini menjadi tugas bersama kementerian dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkannya demi kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Inflasi

Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi untuk periode tahun 2016, 2017 dan 2018 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93.PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Jenis sasaran inflasi yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahunan (year on year). Untuk 2017 inflasi sebesar 4%, dan 2018 sebesar 3,5% . Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Pemerintah dan Bank Indonesia akan senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan tersebut melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan

3.1.3 Nilai Tukar Rupiah

Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp13.300 per Dolar Amerika Serikat. Angka ini lebih rendah dari asumsi nilai tukar rupiah pada APBN 2016 yang berada di level Rp. 13.400 per Dolar Amerika Serikat.

Pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai resiko yang diperkirakan berpotensi memberi tekanan pada nilai tukar rupiah, terutama yang bersumber dari kondisi perekonomian global. Namun demikian, tekanan tersebut diperkirakan akan lebih moderat dibandingkan tekanan yang terjadi pada tahun 2016, seiring dengan upaya pemerintah mendorong investasi.



3.1.4 Lifting Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak Indonesia dipatok pada kisaran 780 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas pada tahun 2017 diperkirakan berkisar antara 1,150 ribu barel setara minyak per hari.

3.2. Laju Inflasi Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Maluku Utara, inflasi Kota Tidore Kepulauan pada bulan September 2016 terjadi inflasi sebesar 0,09 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,66 pada Agustus 2016, menjadi 129,78 pada September 2016.

Adapun andil masing-masing kelompok pengeluaran tersebut terhadap inflasi adalah sebagai berikut : kelompok bahan makanan -0,12 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar -0,01 persen; kelompok sandang -0,02 persen; kelompok kesehatan 0,03 persen; kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga 0,04 persen; serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,01 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada September 2016 antara lain: ikan sorihi, rokok kretek filter, kangkung, lemon, gula, biaya taman kanak-kanak, biaya perguruan tinggi, dan seragam sekolah dan tarif provider ponsel. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain Ikan teri, cakalang, cakalang asap, ikan tuna, baju muslim, sepatu anak dan blus wanita.

3.3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam perencanaan pembangunan sangat membutuhkan data pendukung dalam mengukur tingkat kesejahteraan serta potensi yang terdapat di suatu daerah. Salah satu ukuran yang berperan penting dalam melihat bagaimana suatu sektor dapat menghasilkan produk dan memberikan distribusi pada perekonomian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain pertumbuhan ekonomi, angka PDRB juga dapat mengetahui struktur ekonomi



Kota Tidore Kepulauan dimana kategori ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis ekonomi Kota Tidore Kepulauan. Dengan mengetahui struktur ekonomi, pemerintah daerah dapat memprioritaskan pembangunan pada sektor yang mempunyai peluang untuk berkembang.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB atas dasar harga konstan diperoleh angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 6,20% jika dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 6,12%.

Tabel III.7 Laju Pertumbuhan Rill PDRB
Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013-2014

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.33	5.86	7.74	2.60	1.67
B	Pertambangan dan Penggalian	5.77	7.80	3.20	5.29	4.59
C	Industri Pengolahan	1.99	3.11	4.09	4.11	2.95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.92	20.14	-6.33	58.27	43.01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.96	5.82	5.24	5.79	5.62
F	Konstruksi	6.65	12.65	3.75	4.06	7.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.00	7.97	8.49	9.68	10.08
H	Transportasi dan Pergudangan	4.60	7.45	7.44	8.48	7.69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.00	5.87	5.65	6.81	3.21
J	Informasi dan Komunikasi	5.81	5.26	6.85	7.16	9.69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25.56	10.21	8.19	3.39	4.10
L	Real Estate	7.17	5.56	5.92	6.56	8.54
M,N	Jasa Perusahaan	2.89	3.57	4.51	6.29	5.55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.00	5.72	5.34	8.33	8.29
P	Jasa Pendidikan	6.23	3.71	3.52	4.63	4.05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.59	5.59	6.79	7.55	8.59
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.21	3.40	3.25	5.38	6.07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6.43	6.35	6.23	6.12	6.20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB cenderung menurun dari tahun 2011 s/d tahun 2014 dan selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2015, namun kenaikan tersebut masih lebih rendah dari tahun 2013.

3.4. Lain-Lain Asumsi

1. Sebagai dampak dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya pengalihan urusan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Kementerian. Oleh karena itu seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan penyerahan Personil (PNS), Prasarana (asset), Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) yang juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 yang mencakup penyerahan urusan pemerintahan konkuren (Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus .



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan

Perencanaan pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Disaat pemerintah daerah mengalami pengurangan pada sisi Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan, maka perlu ada upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah melebihi target pada tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat potensi-potensi pendapatan yang apabila dikelola secara maksimal akan meningkatkan pendapatan daerah. Meskipun kontribusi PAD terhadap total APBD masih kecil karena sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tidak sebesar wilayah-wilayah lain di Maluku Utara, namun melalui kebijakan-kebijakan yang terencana dan tepat sasaran Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang Sah. Penerimaan dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana bagi hasil retribusi dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi dan pemda lainnya, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Target Pedapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2017, terdiri dari :

Tabel IV.8 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah sebesar	Rp. 45,525,211,410
2	Dana Perimbangan yang meliputi :	
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp. 17,383,240,000
	b. Dana Alokasi Umum	Rp. 554,976,092,000
	c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 82,445,265,000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	Rp. 56,244,505,000
Total Rencana Pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar		Rp. 756,574,313,410

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

1. Penguatan regulasi dan sistem pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Kegiatan intensifikasi berupa penyempurnaan dan pemutahiran data subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah berbasis efektifitas dan efisiensi.
3. Kegiatan ekstensifikasi berupa pendataan terhadap objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang belum terdaftar sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Penyusunan Data Base untuk Objek dan Subjek Pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Peningkatan sarana dan prasarana bidang kebudayaan dan kepariwisataan untuk menarik minat turis lokal, domestik dan mancanegara untuk visitasi ke Kota Tidore Kepulauan.
6. Kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai bentuk transformasi system pengelolaan PBB sektor perkotaan dan pedesaan menjadi Pajak Daerah.



7. Kegiatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan Walikota tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, pengusaha dan stakeholder lainnya.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 778,911,611,895,- dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 756,574,313,410,- dengan Penerimaan Pembiayaan Rp. 30,837,298,485,- dan Pengeluaran Pembiayaan Rp. 8,500,000,000,- maka sisa lebih anggaran tahun berkenan sebesar Rp. 0,-

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2017 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut.

4.2.2 Kebijakan terkait belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah oba dengan di bentuknya 5 UPTD akan berpengaruh pada peningkatan belanja aparatur dan belanja rutin/operasional.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

Sesuai Visi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis **Agro-Marine**”*, sebagai arah pembangunan Kota Tidore Kepulauan periode 5 tahun kedepan lebih memprioritaskan pada beberapa sektor yaitu



sektor Pertanian, Kelautan Perikanan, Pariwisata, dan sektor Perhubungan sebagai *Prime Over*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016-2021. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan APBD 2017, dan dalam penyusunan KUA PPAS 2017 berlandaskan pada RPJMD tahap kedua dimana pemerintahan merupakan periode pembangunan yang memiliki nilai strategis karena institusi pelaksana kebijakan yaitu birokrasi telah ditata dan dikelola secara profesional, serta kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah telah memberikan/membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.

Tema pembangunan yang diusung pada tahun kedua pemerintahan adalah :

Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah

Arah kebijakan pembangunan pada tahun kedua adalah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang meliputi infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan, air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perkotaan, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah didasarkan atas gagasan bahwa pembangunan tidak saja bermanfaat untuk golongan atau wilayah tertentu saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Infrastruktur yang dibangun pada tahun kedua pemerintahan dilakukan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah sehingga diharapkan terjadi pemerataan pembangunan antar semua wilayah sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian pemerintah daerah mampu mewujudkan pelayanan publik yang adil bagi seluruh masyarakat Tidore Kepulauan. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menggerakkan perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan.



RKPD dalam pelaksanaannya yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi uraian kebijakan dan prioritas secara terinci dan terukur yang ditetapkan bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

4.2.4 Kebijakan Belanja

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pemerintah Daerah tahun 2016-2021 serta mengacu pada arah kebijakan Tahun kedua dalam RPJMD Kota Tidore Kepulauan, maka kebijakan belanja pada Tahun 2017 antara lain :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan sebagaimana di tetapkan dalam undang-undang.
2. Belanja daerah diprioritaskan pada Percepatan dan pemerataan pembangunan Infrastruktur Wilayah di Kota Tidore Kepulauan.

4.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan dan rencana penerimaan pembiayaan serta kebijakan dan rencana pengeluaran pembiayaan. selanjutnya berikut diuraikan kedua Kebijakan pembiayaan tersebut.

4.3.1 Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah. Untuk SiLPA Tahun 2016 sebesar Rp. 30,837,298,485.

4.3.2 Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kota Tidore Kepulauan terdiri dari:

- Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 0,-
- Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 8,500,000,000
- Pembayaran Pokok Utang Rp. 0,-
- Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0,-



BAB V PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Tidore, 17 November 2016

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN ,
Selaku,
PIRAK PERTAMA

PIMPINAN
DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN
Selaku,
PIRAK KEDUA

WALIKOTA
TIDORE KEPULAUAN
(ALI IBRAHIM, MH)

KETUA DPRD
KOTA TIDORE KEPULAUAN
(AHMAD LAIMAN, S.Sos)

WAKIL KETUA

(MOCHTAR DJUMATI,SH)

WAKIL KETUA